



## **Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina**

**Nevy Rusmarina Dewi<sup>a,1</sup>, Maulana Irsyad<sup>b,2</sup>, Mufarikhin<sup>c,3</sup> Ahmad Maulana Feriansyah<sup>c,4</sup>**

<sup>a</sup>Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus, email [nevyrusmarina@iainkudus.ac.id](mailto:nevyrusmarina@iainkudus.ac.id)

<sup>b</sup>Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus, email [maulana.irsyad.uno@gmail.com](mailto:maulana.irsyad.uno@gmail.com)

<sup>c</sup>Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus, email [mufarikhin27@gmail.com](mailto:mufarikhin27@gmail.com)

<sup>d</sup>Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus, email [ansyahferi066@gmail.com](mailto:ansyahferi066@gmail.com)

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
Pelanggaran  
HAM  
Muslim Uyghur  
Komunis

Permasalahan kemanusiaan muslim Uyghur di Cina menjadi salah satu bahasan dunia internasional, yang menjadi fokus ialah pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Cina. Dalam rangka menerapkan ideology komunis di Cinabanyak strategi dipakai oleh pemerintah Cina dalam mendoktrin muslim Uyghur diantaranya, menyiksa, mengurung, sampai perkawinan paksa oleh suku Cina dan suku Uyghur. Tujuan utamanya agar suku Uyghur dapat membaaur dengan warga Cina yang lain dan tak ada lagi perbedaan di bawah Komunis. Hal itu yang menjadikan alasan bahwa pelanggaran hak asasi terhadap suku Uyghur ini terus berlanjut, dalam tulisan ini akan membahas dinamika muslim Uyghur di bawah ideologi Cina beserta dampak permasalahan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan banyak terjadi pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Komunis Cina terhadap muslim Uyghur. Pelanggaran yang terjadi telah masuk pada kategori pelanggaran HAM, namun dunia internasional tidak dapat menjangkaunya karena bagi pemerintah Cina hal ini merupakan masalah dalam negerinya.

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
*Human rights  
violations  
Uighur Muslims  
Communists*

*The humanitarian problem of Uighur Muslims in China has become one of the international discussions, the focus being on human rights violations by the Chinese government. In order to implement communist ideology in China many strategies are used by the Chinese government in doctrining Uighur Muslims including, torturing, confining, to forced marriage by Chinese and Uighur tribes. The ultimate goal is for the Uighurs to blend in with other Chinese and there is no difference under the Communists. That is what makes the reason that human rights violations against the Uighurs continue, in this paper will discuss the dynamics of Uighur Muslims under Chinese ideology and the impact of humanitarian problems. This research uses qualitative research methods using literature study. The results showed that there were many humanitarian violations committed by the Chinese Communist government against Uighur Muslims. The violations that occur have been categorized as human rights violations, but the international community cannot reach them because for the Chinese government this is a problem in their country.*

**Copyright © 2018Tadris IPS Institut Agama Islam Negeri Kudus. All RightReserved**

### **Pendahuluan**

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dunia internasional pada umumnya menganggap Cina telah melakukan diskrimansi agama kepada umat Muslim Uyghur dan sering ditindas oleh pemerintah Cina. Uyghurs adalah minoritas Muslim Turki yang tinggal terutama di wilayah Xinjiang, Cina Barat dan merupakan

sekitar 45 persen dari penduduk Xinjiang. Kebebasan beragama mungkin adalah salah satubentukdiskriminasi dari penindasan yang dialami oleh Uyghurs. Pemerintah Cina yang dimana secara resmi menyatakan semua agama mendapatkan perlakuan sama dan bebas, akan tetapi terus melakukan diskriminasi atas kebijakan yang dibuat pada Muslim Uyghurs. Muslim di Cina harus menanggung label

teroris, pelecehan publik, dan peraturan keagamaan yang ketat. Sebagian besar dunia internasional, menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada Muslim Uyghurs. (Corradini, n.d., 2013)

Kendala utama yang dihadapi Uyghurs saat ini adalah kurangnya dukungan dari masyarakat internasional. Banyak orang Uyghurs setelah serangan 11 September dicurigai sebagai anggota kelompok ekstrimis dan teroris, apalagi ini dihadapkan pada masalah Islamofobia yang terjadi di Barat. Lebih dari 1 juta Muslim Uighur ditahan di pusat-pusat penahanan di provinsi Xinjiang, Cina paling barat. Dengan lebih dari 10% orang Uighur ditahan atas kebijakan pemerintah Cina, hal itu merupakan sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk dan terabaikan dalam 10 tahun terakhir.

Setelah 11 September, pemerintah Cina menetapkan bahwa Muslim Uighur memiliki hubungan dengan kelompok ekstrimis Taliban di Afganistan. Di antara mereka yang ditahan adalah beberapa orang diduga datang kembali dari "Afganistan dan Pakistan". Cina telah menggunakan klaim ini untuk membenarkan penindasan kejam di Xinjiang terhadap kegiatan keagamaan pada Muslim Uighur. Namun, tidak ada bukti yang jelas, bahwa Muslim Uighur merupakan kelompok ekstrimis dan separatis Taliban yang berada di Xinjiang.

Cina dalam beberapa tahun terakhir melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur seperti penangkapan, penutupan tempat ibadah, tindakan keras terhadap kegiatan keagamaan, dan juga pelarangan praktik keagamaan pribadi di lembaga yang dikendalikan negara seperti kantor administrasi, sekolah, dan perusahaan, dan hukuman terhadap ribuan orang tanpa proses peradilan. Xinjiang menjadi satu-satunya propinsi di Cina di mana eksekusi tahanan tanpa proses peradilan. Menurut Amnesty International, lebih dari 200 orang dieksekusi antara tahun 1997 dan 1999 hal ini menjadikan

posisi Cina menjadi perhatian di dunia internasional. (Rights & Backgrounder, 2001)

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fenomena-fenomena yang terjadi di Cina akan dibahas menggunakan data - data yang tersedia untuk bisa memberikan gambaran dinamika kemanusiaan Muslim Uighur di Cina. Analisis data yang digunakan berupa studi pustaka dari berbagai sumber, antara lain buku, surat kabar, artikel jurnal, laporan lembaga internasional.

### **Hasil dan pembahasan**

#### **Sejarah Islam di Tiongkok**

Populasi umat Muslim saat ini sudah tersebar hampir keseluruh pelosok dunia, Cina menjadi salah satu tempat yang terdapat sekitar 22 juta orang atau 1,6% dari total penduduk Cina. Umat muslim disana sudah menetap sangat lama. Pada masa Dinasti Tang sekitar abad ketujuh Islam dibawa ke Cina dari Timur Tengah untuk menemui kaisar Gaozong. Pembangunan peradaban Islam pada masa itu terjadi cukup cepat dengan dibangunnya masjid pertama bersebelahan dengan pelabuhan perdagangan selatan Guangzhou yang memang diperuntukkan untuk orang Persia dan Arab untuk melakukan pelayaran disekitar Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Namun kependudukan Muslim tersebut, hidup terpisah dari umat Muslim mayoritas yaitu Suku Han Cina selama lima abad. Selama masa tersebut pedagang Muslim sangat tergantung pada ekonomi pelabuhan dan pos perdagangan Jalur Sutra (Anne Hammond, 2019).

Perubahan terjadi pada abad ke-13 dibawah kekuasaan Dinasti Mongol, umat Muslim datang secara besar-besaran, mereka menjadi bagian dari system administrasi pemerintah bagi penguasa baru saat itu. Keturunan Gengis Khan, salah satu pendiri kekuasaan Dinasti Mongol meminta bantuan dalam pemerintahannya kepada umat Muslim dari kawasan Asia Tengah seperti Bukhara dan Samarkand. Kekuasaan Dinasti Mongol membawa ratusan ribu umat Muslim Asia Tengah dan Persia yang juga untuk memperluas

dan memperkuat ekspansi wilayah yang mereka lakukan. Kurang pengalamannya dalam menjalankan birokrasi juga menjadi alasan kekuasaan Dinasti Mongol merekrut umat Muslim. Selama pemerintahan Dinasti Mongol banyak pejabat menikah dengan penduduk asli Cina.

Pada abad ke-12 yang dimana ekspansi kekuasaan Ghengis Khan hampir keseluruhan benua, termasuk sebagian besar Eurasia. Umat Muslim dan budaya Cina berpengaruh selama kurang lebih 300 tahun, kekuasaan Dinasti Ming dianggap sebagai periode yang dapat menciptakan kemakmuran dan perdamaian hampir keseluruhan pelosok Negeri. Dan umat muslim sangat berpengaruh dalam pemerintahannya.

Hal berbeda terjadi pada abad ke-18, umat Muslim dengan Cina mulai bersinggungan. Pada periode ini terjadi beberapa bentrokan terkait penempatan tempat tinggal umat Muslim. Pada kekuasaan Dinasti Qing, yang berlangsung dari tahun 1644 hingga 1911, pemerintah yang berkuasa melakukan tindakan represif terhadap para migran, umat Muslim yang datang dari daerah-daerah diluar kekuasaan Cina. Dikarenakan pertumbuhan dan perpindahan penduduk secara besar-besaran ke Cina yang mengakibatkan pemberontakan pada banyak kesempatan.

Pada tahun 1949 negara Cina mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama Republik Rakyat Cina. Terdapat sekitar 56 kelompok etnis, pembagian tersebut didasarkan pada wilayah, bahasa, sejarah, dan tradisi oleh para ahli etnografi dan antropologi. Dan terdapat sekitar 10 etnis Muslim minoritas yang menetap dan tinggal di Cina, 10 kelompok tersebut berdasarkan urutan banyaknya populasi mereka: Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kyrgyz, Salar, Tajik, Uzbek, Bonan, dan Tatar.

Pada awal berdirinya negara Cina, umat muslim cukup mendapat perlakuan yang baik terkait kebebasan beragama yang mereka anut. Namun setelah Cina melakukan Revolusi besar-besaran terkait kebudayaannya untuk mendeklarasikan diri mereka sebagai salah satu

Negara Komunis antara tahun 1966 sampai 1969, banyak tempat peribadatan yang dihancurkan, salinan Al-Quran juga dihancurkan, pelarangan ibadah haji dan semua ajaran keagamaan dilarang oleh kelompok komunis. Bahkan ketegangan meningkat, seiring kasus pengeboman Gedung WTC yaitu peristiwa 9/11. Ketegangan dan kerusuhan di Cina mencapai puncak ketika terjadi kerusuhan antara etnis Uighur dan Han yang hampir terjadi di seluruh provinsi Xinjiang. Pada saat itu pula, Cina meningkatkan pengawasan dan pembatasan terhadap aktivitas muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, isu-isu terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Cina barat diperparah dengan penahanan dan pemaksaan ideologi secara paksa. Pada akhirnya pula tidak hanya muslim Uighur yang mengalami diskriminasi, etnis Kazakh dan etnis minoritas lainnya juga mendapat perlakuan yang sama. Bahkan penelitian terbaru mengungkapkan bahwa Islamofobia di Barat erat kaitannya dengan Islamofobia yang berkembang di Cina, yang dimana pada pemimpin global memilih untuk diam terkait permasalahan kemanusiaan terhadap umat Muslim.

### **Ideologi Negara Cina**

Menurut Franz Magnis Suseno, ada tiga pengertian ideologi (Suseno, 1992, p. 230), yang pertama adalah ideologi sebagai kesadaran palsu yang dimaknai sebagai teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan suatu kelompok yang bagi sebagian kelompok dipergunakan sebagai sarana dalam usaha legitimasi kekuasaan. Kedua ideologi dalam makna yang netral yang diartikan sebagai nilai dan sikap dasar serta sistem berpikir yang ada dalam suatu kelompok sosial dan biasanya dipergunakan sebagai dasar ideologi oleh negara. Ketiga ideologi yang diyakini dalam filsafat dan ilmu sosial positivistik sebagai keyakinan yang tidak ilmiah.

Sebagai Negara komunis yang kontraakan adanya agama lain selain agama utama, merupakan hal khusus adanya agama islam di

Negara komunis seperti Cina karena menurut Cina agama adalah merupakan ancaman, banyak sumber yang kredibel yang menyatakan agama adalah ancaman bagi ideology Cina. Berikut adalah pernyataan pemimpin Negara tersebut yang menyatakan bahwa ancaman besar bagi kepemimpinan Partai Komunis tidak Hanya korupsi dan oposisi. Menurut seorang pejabat, ancaman besar yang mengintai saat ini bagi partai adalah kepercayaan terhadap agama dan takhayul. Chen Xi, kepala Departemen Pengorganisasian Partai Komunis yang mengurus keanggotaan partai, mengatakan banyak anggota yang "moralnya jatuh" karena kepercayaannya terhadap komunisme dan sosialis mulai luntur.

kata Chen, penduduk Cina mulai memercayai TuHan dan arwah, mendatangi para ahlinujum dan dukun, semakin meninggalkan ideologi Marxisme dan Leninisme. Menurut Chen, jika ini dibiarkan, maka keberadaan Partai Komunis bisa terancam. "Beberapa tidak lagi meyakini Marx dan Lenin, tapi percaya para arwah-arwah dan TuHan-TuHan; mereka tidak lagi yakin pada ideologi, tapi yakin pada ilmu sihir; mereka tidak menghormati rakyat, tapi menghormati para master (guru spiritual)," ujar Chen dalam sebuah tulisan opininya di media milik pemerintah.

Cina membebaskan rakyatnya memeluk agama, seperti Islam, Kristen, atau Buddha. Tapi hal ini tidak berlaku untuk anggota Partai Komunis yang wajib ateis. Anggota partai juga dilarang percaya pada praktik perdukunan atau takhayul, seperti mendatangi ahli nujum. ("Ancaman Bagi Partai Komunis Cina: Agama - kumparan.com," n.d.)

### **Pelaksanaan HAM dan Permasalahan Kemanusiaan Muslim di Cina**

Menurut Miriam Budiarto, pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada pada manusia dibawa dan diperoleh sejak lahir yang bersifat asasi dalam rangka hidup di masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, bangsa, maupun agama (Budiarto, 2008). Secara umum hak asasi manusia merupakan

hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu pemberian tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Pelaksanaan HAM di Cina sesuai dengan konstitusi negara Cina, telah diatur tentang HAM, bahkan Pemerintah Cina memiliki dasar hukum khusus yaitu Empat prinsip utama konstitusi (The Four Cardinal Principles) yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hak dasar warga negara yang dimiliki oleh Cina. Empat prinsip tersebut memiliki dasar pada prinsip utama Partai Komunis 1979, antara lain yaitu: 1) penegakan jalan sosialis, 2) penegakan diktator rakyat demokratis, 3) penegakan kepemimpinan Partai Komunis Cina, 4) penegakan ajaran Marxis-Leninis dan Mao Zedong (Diantha, 2016, pp. 21–22)

Kemanusiaan di Cina mengalami banyak permasalahan kemanusiaan dan sebenarnya karena sudah dijelaskan di atas mengenai sejarah muslim di Cina banyak kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dialami umat muslim disana salah satunya yaitu genosida, genosida sendiri dapat diartikan penghapusan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengacaukan dan berusaha menghapuskan sejarahnya dan menghancurkan symbol-simbol peradabannya. Selain itu juga ada pembersihan ras, etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok memindahkan secara paksaan akan ke dalam kelompok ke kelompok lain.

Pelanggaran HAM yang terus dilakukan oleh pemerintahan Cina, dan terbukti juga melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang, dimana ada pelanggaran beragama yang dimana ini akan sampai pada pembahasan internasional pastinya, bahwa ada pelanggaran dari otoritas ke pemerintahan Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang untuk melakukan kegiatan keberagamaan seperti puasa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta masjid-masjid yang dijaga oleh tentara menjadikan suatu diskriminasi muslim Uighur. Selain kebebasan dalam beragama, Pemerintah Cina juga melakukan pelanggaran HAM lainnya yaitu kebebasan untuk berdiskusi tentang keberagamaan dan isu-isu di Cina serta melarang berkembangnya bagaimana kajian-kajian muslim menanggapi hal tersebut, hambatan atas pendidikan, diskriminasi, serta hukuman mati terhadap tahanan politik. Selain rumah-rumah ibadah dijaga ketat bahkan keberadaan sekolah Islam dan Imam dikontrol secara ketat oleh pemerintah PKC, dan para imam diharuskan untuk berdiri di sisi pemerintah untuk dapat melancarkan propaganda bagi Muslim Uighur.

Hal ini pastinya sesuai dengan pengertian HAM yang di keluarkan oleh PBB dan berbagai teori ahli, yang menjelaskan tentang hak asasi manusia secara internasional penulis setuju bahwa pemerintah Cina telah melanggar hak asasi manusia Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah: 1) Mengakui atas martabat dan Hak-hak yang setara bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia, 2) Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia, 3) Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum, 4) Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan, 5) Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan., 6) Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asasi umat manusia, 7)

Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Bahkan sejak tahun 1995 sampai 1999 total sudah 70 buah tempat beribadah yang sudah dihancurkan oleh pemerintah Cina serta mencabut surat izin imam yang tidak mendukung pemerintahan Cina total ada 44 orang, pemerintahan Cina secara frontal mengeluarkan statement untuk pelarangan beribadah di kawasan pemerintah Cina contoh di kawasan umum yang milik pemerintah Cina. Selain itu para muslim Uighur juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berposisi tinggi di bandingkan dengan suku Han, sering pula suku Uighur mendapatkan perlakuan kasar dari pemerintah Cina. Berdasarkan laporan *Amnesty Internasional*, satu-satunya Provinsi di Cina yang mengizinkan hukuman mati terhadap tahanan politik berada di Xinjiang. Jumlah pasti korban tahanan politik yang di hukum mati disembunyikan oleh negara Cina, namun menurut Dogu Turkestan, jumlah tewas akibat hukuman mati ataupun penyiksaan oleh pemerintah Cina mencapai 2.500 jiwa dari tahun 1999 sampai maret 2000 saja.

Peristiwa diskriminasi yang terus dialami oleh Muslim Uighur adalah demi terlaksanakannya kebijakan pemerintah Cina yang menginginkan terwujudnya *One Cina Policy* atau kebijakan Cina satu. Pola-pola intergratif pemerintah Cina dengan melakukan *civic education* terbukti tidak berhasil mengintegrasikan Muslim Uighur dengan penduduk Cina mayoritas lainnya. Bahkan justru etnis Muslim Uighur melakukan perlawanan karena kebijakan migrasi Pemerintah Cina dengan melakukan perpindahan secara besar-besaran etnis Han, yang merupakan etnis mayoritas ke daerah Xinjiang dan Urumqi, migrasi besar-besaran pada kurun waktu yang singkat yaitu satu tahun untuk migrasi besar-besaran yang berhasil mengubah peta demografi Cina pula, peristiwa ini terjadi pada tahun 1959-1960 dimana 800.000 etnis Han bermigrasi ke Xinjiang.

Keputusan pemerintah Cina untuk melakukan *ethnic cleansing* (pembersihan etnis)

genosida, untuk menyingkirkan Muslim Uighur secara perlahan dari wilayah Xinjiang dan Urumqi, selain itu juga kebijakan keluarga berencana ini di Cina menguntungkan suku Han, yang memiliki tingkat pertumbuhan populasi 31,6 lebih tinggi dibanding suku lainnya yang maksimal mencapai 15,9%, kebijakan keluarga berencana ini yang mengharuskan rakyat di Cina untuk mempunyai anak Hanya satu juga diklaim merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Cina untuk melakukan *ethnic cleansing*.

Berikut adalah kebijakan utama Cina di Xinjiang sejak tahun 1990:

1. Resentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, sejak tahun 1980 an Cina mengalami kekacauan sector ekonomi yang disebabkan tak terjalannya hubungan ekonomi yang tersentral akibatnya banyak pelaku ekonomi di Cina yang melakukan ekonominya dengan mandiri dan inimenjadikan dominasi pemerintah Cina jadi berkurang ditengah kebijakan one policy Cina yang digalakkan kembali oleh pemerintah Cina. Dan sekaligus menyalahi aturan ideology Cina yang dimana pemerintah punya control penuh oleh ekonomi di Cina.
2. Etnis Han dimigrasi, untuk meratakan suku Han dan penekanan perbedaan etnis di Cina maka pemerintah Cina menyebarkan penduduk etnis Han lewat cara imigrasi besar-besaran dimana imigrasi ini dilakukan dengan waktu yang sangat singkat dan berhasil memindahkan penduduk yang banyak, sekitar 800,000 penduduk etnis Han "berhasil di pindahkan.
3. Eksploitasi sumber daya alam di Xinjiang, Wilayah Xinjiang adalah wilayah yang kaya sumber daya alam mineral, antara lain, selain sebagai produsen minyak signifikan karena 25% total cadangan minyak dan gas, juga 38% cadangan batubara Cina berada di Xinjiang. Belum lagi telah ditemukan potensi minyak di

Lembah Janggar, termasuk 122 mineral langka di antaranya — menurut Science.gov ada potensi cadangan uranium di Yili dan Basin. Dari keadaan ini yang perlu kita sorot adalah strategi manuver geopolitik para Kapitalis Global.

4. Mempererat hubungan ekonomi dan politik dengan negara- negara di Asia Tengah, Wilayah Xinjiang merupakan simpul vital bagi One Belt One Road (OBOR), proyek Jalur Sutra Modern yang digagas Xi Jinping yang telah melintas 60-an negara di Asia Afrika bahkan hingga Eropa dimana secara kuantitas, geliat OBOR sudah melebihi Commonwealth yang beranggota 53 negara ex-jajah Inggris. Tentunya AS sebagai rival Cina punya agenda untuk melumpuhkan kekuatan Cina di jantungnya Jalur Sutra, yakni di Xinjiang.
5. Negara mempererat kontrol atas agama dan budaya etnis minoritas. Agar hegemoni pemerintah Cina dan tak kehilangan marwah komunis maka pemerintah Cina memperluas pengaruhnya kepada intervensi beragama tujuannya agar pandangan beragama tidak mengganggu ideology Cina yang telah berjalan lama maka pemerintah mengalau ideology tersebut dengan berbagai cara salah satunya dengan kekerasan dan penindasan serta pemaksaan untuk melestarikan doktrin komunis , contohnya kasus muslim Uighur (Rights & Backgrounder, 2001)

Kejahatan yang disengaja serta tertuju kepada etnis Muslim Uighur secara terus menerus di Cina, telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dan massif dimulai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Cina yang menyudutkan keberadaan muslim Uighur, hingga adanya propaganda pemerintah Cina yang menjadikan muslim Uighur sebagai kambing hitam atau etnis yang dipersalahkan atas kejadian berdarah yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2009, walaupun fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah banyaknya

korban jiwa yang jatuh di pihak etnis Muslim Uighur sebanyak kurang lebih 200 orang gugur dan melukai 1.700 orang terluka dalam peristiwa tersebut dan semuanya adalah Muslim Uighur, yang kemudian propaganda tersebut tumbuh dan berkembang sehingga menyulut kemarahan etnis Han terhadap etnis muslim Uighur.

Pada tataran ini maka demo massal yang dilakukan oleh Muslim Uighur tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari *Political Action* yang bersifat *Violence*. Karena saat itu pemerintah Cina mengerahkan kemampuan militernya untuk membendung aksi demo yang awalnya berjalan damai tersebut hingga menimbulkan kekerasan yang berujung pada konflik antar etnis Han dengan Muslim Uighur.

#### **Upaya Pemerintah Cina untuk Meredam konflik di Xinjiang**

Kira-kira satu tahun setelah terjadi konflik etnis yang mematikan di Xinjiang, orang Tionghoa. Para pemimpin meluncurkan sebuah paket kebijakan baru dan berjanji untuk membawa stabilitas abadi di Daerah bergolak ini melalui "perkembangan lompatan". Dalam 10 tahun ke depan Pemerintah akan menuangkan ratusan miliar yuan ke Xinjiang untuk meningkatkan Ekonomi dan meningkatkan kehidupan semua kelompok etnis. Xi mengeluarkan seruan militer tradisional pada hari Jumat, dalam sebuah sesikongres rakyat nasional, parlemen perangka karet tahunan Cina, di Beijing. Pemimpin penting Cina meminta pejabat untuk bertindak untuk membawa "perdamaian dan stabilitas abadi" ke wilayah perbatasan yang terkurung daratan, yang memiliki sejarah berdarah kekerasan etnis dan, baru-baru ini, serangan teroris. Pasukan Cina menunjukkan kekuatan di Xinjiang dan bersumpah untuk 'mengalahkan' separatis tanpa henti. (manggabarani A, 1990)

Komentar Xi mengikuti serangkaian demonstrasi "anti-teror" massif di Xinjiang, yang merupakan rumah bagi minoritas Uighur yang berbahasa Turki dan sebagian besar Muslim

serta semakin banyak migran Han Cina. Puluhan ribu tentara bersenjata telah menuangkan kejalan-jalan di sana dalam beberapa pekan terakhir, berjanji untuk melakukan "perang melawan teror" terhadap militan. Pada sebuah demonstrasi kekuatan baru-baru ini kepala partai Komunis regional mendesak pasukan untuk "mengubur mayat-mayat teroris di lautan perang rakyat yang luas".

Selama bertahun-tahun Xinjiang telah dirusak oleh pecahnya kekerasan etnik yang ganas, seorang ahli proses percaya telah diperburuk oleh perlakuan buruk pemerintah terhadap warga Uighur, yang mencakup pembatasan agama yang kejam dan diskriminasi sosial dan ekonomi. Demonstrasi anti-teror Cina ribuan tentara di jalan-jalan di Urumqi. Pihak berwenang di RRC membuat klaim bahwa ETIM dan menghubungkan kelompok Uighur yang menentang peraturan Cina di Turkistan Timur berbagi hubungan ideologis dan organisasi yang mendalam dengan jaringan teroris Al-Qaeda dan sejenisnya. Akibatnya, Beijing telah meminta masyarakat internasional untuk membantu menggagalkan kegiatan organisasi Uighur ini.

#### **Upaya Umat Muslim Uighur Dalam Menghadapi Kebijakan Politik Pemerintah Komunis Tiongkok.**

Hubungan kelompok mayoritas-minoritas dalam masyarakat dan atau negara bila bersifat dominasi pada akhirnya menumbuhkan problematika politik yang sangat berbahaya bagi kelangsungan integrasi negara bangsa. Sebab kelompok minoritas yang merasa tertindas dapat memberikan reaksi dalam salah satu dari dua bentuk yang sama-sama berimplikasi negatif. Menurut Mashad (2006, hlm. 117), terdapat dua pola reaksi masyarakat terhadap masalah ini. Pertama masyarakat bersikap takut, apatis, yang akhirnya mengembangkan sikap pasif, tidak mau partisipasi aktif dalam berbagai kebijakan, yang pada ujungnya menggagalkan program-program pemerintah. Sikap apatis ini bisa berakibat lebih besar juga seperti penyangkalan

terhadap berbagai nilai sipil bernegara yang seharusnya di taati bersama. Kedua, bersikap reaktif konfrontasi bahkan dapat mengarah pada pemberontakan bersenjata tapi tetap mungkin dalam konteks negara dalam arti sekedar ingin menggulingkan dan mengganti pemerintah. Namun bisa pula perlawanan bersenjata lebih jauh ditujukan dalam semangat separatisme. Kasus minoritas etnis Uighur di Tiongkok sendiri memiliki pola reaksi perlawanannya lebih bersifat konfrontatif, bahkan melalui cara bersenjata dengan tujuan separasi dari negara.

Ekspresi atau respon perlawanan dari muslim Uighur ini muncul karena telah dikeluarkannya kebijakan-kebijakan representatif oleh RRC seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya sehingga bentuk yang dilakukan gerakan Uighur menghadapi tantangan serius. Namun perlu kita ketahui orang Uighur yang jumlahnya kecil dibanding pemerintah RRC, tidak memiliki perlengkapan, tidak memiliki ikatan, dan tidak memiliki senjata oleh PLA dan Polisi Bersenjata lainnya dan mereka bahkan tidak memiliki seorang pemimpin seperti Dalai Lama di Tibet yang dapat menjadi titik berkumpul bagi orang-orang yang tinggal di pusat kota. Ini yang nantinya merupakan faktor semakin memperlemah gerakan perlawanan dari Uighur sendiri.

Dengan demikian Penulis melihat respon yang dilakukan oleh Etnis Uighur merupakan ekspresi atas kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, respon yang dilakukan dimulai pada tahun 1990-an dimana etnis Uighur mulai melakukan demonstrasi-demonstrasinya terhadap pemerintah dan pada tahun tersebut Uighur mulai dikenal memiliki organisasi-organisasi nasionalisnya. Respon yang dilakukan semula hanya demonstrasi biasa hingga akhirnya menggunakan senjata dan bahan peledak hingga puncaknya Uighur melakukan serangan pisau pada tahun 2014.

## **Sikap dunia internasional tentang konflik Uighur**

Sikap dunia internasional terhadap konflik di Xinjiang tepatnya yang menimpa suku Uighur mendapatkan perhatian oleh Negara-negara besar contohnya Amerika Serikat dan 30 negara lainnya mengemukakan perlakuan pemerintah Cina terhadap suku Uighur selaku suku yang minoritas disana tepatnya di Xinjiang. Wakil menteri luar negeri AS mengatakan bahwa PBB dan semua Negara mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mengangkat isu-isu tertentu, ketika saksi peristiwa kejahatan itu selamat dan mengetahui serta dapat bercerita akan hal itu di suatu Negara.

Menteri luar negeri AS mengatakan sebuah kewajiban bagi negara-negara anggota PBB untuk memastikan organisasi tersebut dapat memonitor secara ketat dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Cina. Sullivan menuturkan bahwa pernyataan yang digagas AS dan didukung oleh Kanada, Jerman, Belanda, dan Inggris itu telah didukung lebih dari 30 negara, perwakilan Uni Eropa, dan lebih dari 20 organisasi non-pemerintah termasuk para etnis Uighur yang menjadi korban penindasan Cina. AS mengundang negara lain untuk bergabung dengan upaya internasional demi menuntut dan memaksa Cina mengakhiri sikap yang menekan etnis Uighur. Sementara itu, Cina melalui Kementerian Luar Negerinya mengemukakan langkah AS tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, menuturkan masalah yang terjadi di Xinjiang bukan tentang penindasan hak asasi manusia, tetapi tentang melawan gerakan separatisme dan terorisme. Cina memang terus menjadi sorotan dunia internasional, salah satunya terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang. Pada 2018 lalu, organisasi pemerhati HAM, Amnesty International, melaporkan bahwa Cina telah menahan satu juta etnis Uighur, Kazakh, dan lainnya di sejumlah penampungan layaknya kamp konsentrasi. ("Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif Cina ke Uighur," n.d.)



## Sikap Indonesia tentang Pelanggaran HAM di Xinjiang

Penelitian di Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyatakan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak memberi respon atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang berkaitan dengan urusan ekonomi. Salah satu faktor utama adalah dugaan ketergantungan Indonesia terhadap modal dari Cina yang cukup besar (Amalia, 2018). Dalam laporan terbarunya yang berjudul *Explaining Indonesia's Silence on the Uyghur Issue*, IPAC menuturkan "Cina adalah mitra dagang terbesar dan juga investor kedua terbesar" Indonesia. Hal itu disebut enggan

### Simpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat melihat adanya pelanggaran terkait isu kemanusiaan di Cina. Kebijakan-kebijakan pemerintah Cina cenderung berimplikasi negatif terhadap kehidupan kaum minoritas disana, salah satunya Muslim Uighur. Dalam sejarahnya umat muslim di Cina mempunyai hubungan baik dengan penduduk asli Cina dalam membangun kehidupan hingga bekerjasama dalam sistem pemerintahan. Tetapi kehidupan masyarakat muslim di Cina berubah ketika Cina menginisiasi menjadi salah satu Negara dengan paham komunis, paham komunis sangat bertentangan dengan kehidupan umat muslim disana. Komunisme yang identik dengan paham Atheisme dan menganggap agama hanyalah sebuah penghalang dalam kehidupan di implementasikan dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Cina.

*Political will* dari rezim yang berkuasa di Cina sangat mendiskriminasi Muslim Uighur di Cina. Pada saat yang sama ketika dunia Hanya berfokus pada isuterorisme yang terjadi di Barat dan Timur Tengah, Pemerintah Cina seolah menutupi isu kemanusiaan yang terjadi dan dunia seolah bungkam terhadap tindakan Cina. Cina yang pada saat ini telah berubah menjadi salah satu pemegang kekuatan dunia

mengangkat isu Uighur dalam hubungannya dengan Cina. Indonesia juga melihat isu Uighur sebagai isu politik domestik Cina terkaitis eparatisme, dan tidak dilihat sebagai pelanggaran HAM. Beberapa isu strategis yang menjadi fokus Indonesia-Cina selama ini yakni seperti sengketa Laut Cina Selatan dan proyek Sabuk dan Jalan Ekonomi (*Belt and Road Initiative*). Saat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih menjabat, beliau yang menyatakan menentang pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Namun, dia juga tidak bisa bergerak terlampau jauh karena menganggap hal itu adalah masalah dalam negeri Cina.(agus setyawan, 2018).

seolah-olah ingin menyembunyikan segala tindakan pelanggaran mereka terkait isu kemanusiaan. Indonesia sendiri juga bungkam terkait isu kemanusiaan tersebut dikarenakan Cina sendiri merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia enggan untuk secara aktif terlibat dalam penyelesaian konflik kemanusiaan tersebut.

### Referensi

- Agus setyawan, fery. (2018). Riset: Indonesia Diam Soal Uighur karena Investasi China.
- Amalia, L. E. (2018). *Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Islam*. Ancaman Bagi Partai Komunis China: Agama - kumparan.com. (n.d.).
- Anne Hammond, K. (2019). The history of China's Muslims and what's behind their persecution.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Corradini, B. K. (n.d.). *Uyghurs under the Chinese State : Religious Policy and Practice in China*. 29–40.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi Republik Rakyat Cina (RRC)*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Manggabarani A, yogi. (1990). UPAYA PEMERINTAH CINA

MENYELESAIKAN KONFLIK DAN  
PEMBERONTAKAN DI XINJIANG  
1990 – SEKARANG. 日本ワーグナー  
協会編 『年刊ワーグナー1990』, : 6–  
8.

Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif  
China ke Uighur. (n.d.).

Rights, A. H., & Backgrounder, W. (2001).  
*China : Human Rights Concerns in  
Xinjiang*. (June).

Suseno, F. M. (1992). *Filsafat Sebagai Ilmu  
Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.